

BAB II

STUDI KEPUSTAKAANDAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005;3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaftar (dalam Ndraha, 2010;16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Musanef (dalam syafiie, 2005;32-33) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasiaan kedalam hubungan antara dinas0dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar,
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan anantara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihidari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efesiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007:4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi

pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat mengulirkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkupan hidup.

3. Konsep Pemerintah

Sedangkan menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Kemudian menurut Syafiie (2011:4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah

itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah, Pelayanan yang mana dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan adalah suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Dan juga pelayanan sifatnya dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi, dan pelayanan itu kenyataannya terdiri atas tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tidak sosial, produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama. Kemudian fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai proses pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pembangunan suatu yang, oleh, untuk masyarakat, sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus dimasukkan untuk benar-benar memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia dan (masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.
- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan
Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah Soewargono

dan Djohan (dalam Labolo, 2011 : 37) menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama

pemerintah adalah membuat kebijakan”. Mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang di keluarkan oleh pemerintah karena yang di atur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

4. Konsep Kebijakan

Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (Ilmu Pemerintahan baru) (2011;491) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa “*policy*” adalah “*a course of action*”. Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011;491) “*policy is a pattern of collective action*”.

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2005 : 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemserintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung kootasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang ada diterima oleh

public, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakn *public* yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan *public* untuk meningkatkan kehidupan *public* itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan(Dye dalam Nurcholis, 2007: 264).

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengaatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai denga bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004:1-7).

Menurut Koryati (2005:2007), kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah *public* yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan :*what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

5. Konsep Terminal

Menurut Peraturan Menteri No: PM 40 Tahun 2015, tentang standar pelayanan penyelenggaraan Terminal penumpang angkutan jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/barang, serta perpindahan moda angkutan. Dan penyelenggara terminal adalah unit pelaksana teknis dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan Kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, Serta perpindahan moda angkutan. Dibutuhkan suatu pelayanan yang baik yang berfungsi secara efektif dan efisien pada sebuah terminal agar mendukung terhadap kelancaran efektifitas dan efisiensi kendaraan umum secara keseluruhan. Sebuah terminal harus mampu memberikan pelayanan yang baik, untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai sebuah terminal yang baik maka kapasitas

terminal harus memadai, untuk mencakup semua pergerakan kendaraan umum di suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri No: PM 40 Tahun 2015, Lokasi terminal penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat.

6. Konsep Pengelolaan

Kamus besar bahasa Indonesia (1997) kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola: yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti dari pengelolaan itu sendiri adalah proses, cara perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Balderton (dalam Adasmita. 2011;22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia yang memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Hamalik (dalam Adisasmita. 2011;22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Moekijat (dalam Adisasmita. 2011;21) Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Manajemen dan pengelolaan adalah proses pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2008:8).

Menurut Malayu Hasibuan (2004:40-41) manajemen atau pengelolaan terdapat beberapa fungsi yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasia (Organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi seseorang penelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

3. Pengarahan

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang dapat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut delegasi diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Daar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagaikegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut George R. Terry (2000:16-19) fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikirin dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut

kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

3. Penggerakkan (actuating) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (Controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, peorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indakator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Analisis Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis



Sumber: Modifikasi Penulis 2018

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- b. Pemerintah daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.
- c. Analisis adalah analisis merupakan salah satu bidang akademis. Hal ini adalah karena setiap saat terjadi perubahan. Untuk memenuhi semua tantangan di dalam perubahan tersebut, perusahaan membutuhkan analisis perencanaan strategi.
- d. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- e. Perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.
- f. Peorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

- g. Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
- h. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- i. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- j. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu dinas yang mempunyai kewenangan untuk mengatur transportasi laut, darat, dan udara.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendiskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabael II.1: Konsep Operasional Variabel Tentang Analisis Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
Manajemen dan pengelolaan adalah proses pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2008:8).	Analisis Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Perencanaan	1. Adanya target yang ingin dicapai 2. Adanya pengelolaan retribusi 3. Adanya SOP bagi petugas	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Pengorganisa sian	1. Adanya tim yang dibentuk untuk retribusi terminal 2. Adanya pembagian tugas dan wewenang 3. Adanya petugas pengawas	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Penggerakan	1. Adanya petunjuk pelaksana bagi petugas terminal 2. Adanya petunjuk tertulis untuk pegawai dalam pengelolaan retribusi terminal 3. Jelasnya prosedur kerja bagi petugas terminal maupun petugas pajak	Baik Cukup Baik Kurang Baik

1	2	3	4	5
		Pengawasan	1. Adanya pemeriksaan pekerjaan petugas terminal dilapangan 2. Adanya pemeriksaan hasil pekerjaan pegawai yang menangani redistribusi terminal 3. Dilakukan pemeriksaan dalam bentuk laporan pekerjaan pada petugas atau pegawai	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

E. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

Analisis Pengelolaan Terminal Duri Bestari Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

Adapun Pengukuran Untuk Indikator penelitian ini adalah :

1. Perencanaan

Baik : Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilain yang berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

2. Pengorganisasian

Baik : Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilaian yang berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

3. Penggerakan

Baik : Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilaian yang berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

4. Pengawasan

Baik : Apabila Seluruh item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari dua item penilaian berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila tidak ada item penilaian yang berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

